Departemen Tenaga Kerja

Temuan Bentuk Terburuk Pekerja Anak 2019

Indonesia

Pada tahun 2019, Indonesia mencapai kemajuan moderat dalam upayanya menghilangkan bentuk terburuk pekerja anak. Pemerintah telah menerbitkan laporan Profil Anak Indonesia yang menjadi sumber data pemerintah terbaru mengenai pekerja anak yang tersedia untuk publik. Pemerintah juga menambah pendanaan Inspektorat Tenaga Kerja secara substantif dari \$10,2 juta pada tahun 2018 menjadi \$16,7 juta pada tahun 2019, di mana sebagian dana tersebut dialokasikan secara spesifik untuk menegakkan regulasi pekerja anak. Selain itu, POLRI telah menyelidiki kasus perdagangan anak yang melibatkan 28 korban anak. Meski demikian, anak-anak di Indonesia masih dilibatkan dalam bentuk terburuk pekerja anak, termasuk eksploitasi seksual komersial, yang terkadang adalah akibat perdagangan manusia. Anak-anak juga melakukan pekerjaan berbahaya di sektor perkebunan, termasuk produksi minyak kelapa sawit dan tembakau. Kementerian Tenaga Kerja masih kekurangan sumber daya finansial dan personel yang diperlukan untuk sepenuhnya menegakkan hukum pekerja anak di seluruh negeri. Di samping itu, pemerintah tidak menerbitkan informasi penegakan hukum kejahatan sehubungan jumlah investigasi yang telah dilakukan, pelanggaran yang ditemukan, penuntutan yang diupayakan, dan penjatuhan hukuman untuk kejahatan terkait bentuk terburuk pekerja anak.

Berdasarkan laporan ini, sejumlah saran tindakan telah diidentifikasi untuk memajukan pemberantasan pekerja anak di Indonesia.

Bidang	Tindakan Yang Disarankan	Tahun-Tahun Yang Disarankan
Kerangka Kerja Hukum	Memastikan agar adanya ancaman, penggunaan kekuatan, atau pemaksaan tidak menjadi prasyarat penetapan kejahatan perdagangan anak.	2018 – 2019
	Memastikan jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan berbahaya yang dilarang bagi anak-anak sudah komprehensif, termasuk sektor-sektor yang diketahui mempekerjakan anak, termasuk joki untuk balapan kuda di mana ada bukti bahwa anak-anak terpapar bahaya fisik.	2019
Penegakan	Memastikan pendanaan untuk Inspektorat Tenaga Kerja cukup untuk infrastruktur, transportasi, dan kebutuhan bahan bakar sehingga inspektur tenaga kerja dapat melaksanakan inspeksi.	2018 – 2019
	Memastikan para inspektur tenaga kerja memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi sektor informal, termasuk pertanian dan rumah tinggal pribadi, guna mengidentifikasi pelanggaran pekerja anak.	2018 – 2019

Bidang	Tindakan Yang Disarankan	Tahun-Tahun Yang Disarankan
	Penambahan jumlah inspektur tenaga kerja secara signifikan untuk memenuhi saran teknis ILO sehingga pemeriksaan tenaga kerja dapat dilakukan secara memadai.	2010 – 2019
	Menerbitkan informasi penegakan hukum kejahatan, termasuk jumlah investigasi yang dilakukan, pelanggaran yang ditemukan, penuntutan yang diupayakan, dan penjatuhan hukuman atas kejahatan terkait pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk terburuknya.	2009 – 2019
	Memastikan agar semua personel penegak hukum kejahatan menerima pelatihan tentang regulasi pekerja anak.	2017 – 2019
Koordinasi	Mendanai Gugus Tugas Provinsi dan Distrik secara memadai dan mewajibkan mereka mengikutsertakan rekomendasi dari Gugus Tugas Nasional untuk Memerangi Perdagangan Manusia dalam rencana-rencana tindakan mereka untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak-anak.	2016 – 2019
Program Sosial	Mengumpulkan dan menerbitkan data tentang pekerja anak usia 5 sampai 10 tahun.	2019
	Melakukan penelitian untuk menetapkan jenis kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk sektor pekerjaan konstruksi dan jalanan, sehingga menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program sosial.	2014 – 2019
	Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan pendidikan, termasuk menghapuskan pungutan sekolah dan memastikan agar semua anak bisa memperoleh nomor identifikasi siswa yang diterbitkan pemerintah sehingga mereka bisa masuk sekolah.	2016 – 2019